

**SKRIPSI**  
**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE**  
**DI KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA SECARA INTEGRATIF**



**Oleh :**  
**Siti Aisah**  
**1500024119**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan**

**Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**2019**

**THESIS**

**THE LAW ENFORCEMENT OF ONLINE FRAND CRIMINAL ACT IN**

**SLEMAN REGENCY OF OGYAKARTA INTEGRATIVELY**



**Written by:**

**Siti Aisah**

**1500024119**

**The Thesis submitted as a fulfillment of the requirementst**

**to attain the Bachelor Degree of legal studies**

**FAKULTI OF LAW**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**2019**

# **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DI KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA SECARA INTEGRATIF**

**Siti Aisah**

## **ABSTRAK**

*Penipuan Online* adalah yang dapat mengacu pada aktivitas kejahatan yang dimana perbuatan tersebut dapat menggunakan jaringan atau komputer sebagai sarana atau alat untuk melakukan suatu kejahatan, perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab atas tingkah laku yang dilakukan melalui media ninternet, termasuk didalamnya antara lain adalah penipuan pada jual-beli, transaksi dan atau mencuri suatu data dari pihak lain, dimana hal tersebut dapat menggunakan jaringan komputer (*E-Commerce*). Dimana faktor penyebab utamanya adalah faktor masyarakatnya sendiri, faktor budaya, dan faktor lingkungan, dari berbagai kejahatan penipuan online Polres Sleman telah melakukan berbagai macam upaya antara lain, melakukan penindakan terhadap kejahatan pelaku, melacak keberadaan pelaku, pemblokiran nomor rekening pelaku, melakukan penindakan dan daya kerja di berbagai institusi yang berkaitan dengan tindak pidana, serta upaya lainnya adalah dengan memberikan himbauan kepada masyarakat menggunakan media internet.

Tujuan pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui peranan Polresta Sleman dalam mengungkap kebenaran dari faktor penyebab terjadinya penipuan *online* tersebut. Serta bagaimana upaya penegakan dan pencegahan terhadap kejahatan penipuan *online* yang terjadi di kabupaten Sleman.

Penulis mengambil lokasi penelitian di Polres Sleman, metode penelitian adalah metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mengumpulkan sejumlah data yang berkaitan dengan topik penelitian, serta melakukan wawancara dan studi kepustakaan.

**Kata Kunci : Penegakan hukum, Tindak Pidana, Penipuan Online**

# **THE LAW ENFORCEMENT OF ONLINE FRAND CRIMINAL ACT IN SLEMAN REGENCY OF OGYAKARTA INTEGRATIVELY**

**Siti Aisah**

## **ABSTRACT**

Online fraud refers to a crime where network system and computer can be used as the facility or to do the crime. It is an activity that is against the law and is done by cartain people who are responsible for the crime. It can be done via internet and may involve purchase fraud, transaction fraud, and data theft, where computer can be used (e-commerce) to cary out the action. The factors that my cause the online froud phenomenom include society factor, cultura factor and environmental faktor. From various online fraud crimes that have happened, the Departmental Resort Police (Polres) of Sleman has attemped a number of efforts, including of prosecuting the criminal, tracking the location of the perpetrator, blocking the bank account of the perpetrator, supporting various institutions related to the criminal act, as well as onther eforts including addressing thr issue and making it public trough the internet.

This research, basically, aims at finding out the roles of Polres of Sleman in rivealing the trauth of the factors causing the online fraud phenomenom, as well as finding out the enforcement and preventive efforts made to combat online fraud crimes in Sleman regency.

The outhor conducted the research iin the city Police of Sleman. The research method employed was field research method by collecting the data that were related to the research topic and conducting interview and library research.

**Keywords: law enforcement, criminal act, online fraud.**

## **A. Pendahuluan**

Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informatika telah berjalan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Kecanggihan teknologi informasi elektronik dewasa ini cukup memudahkan setiap orang melakukan berbagai komunikasi satu dengan yang lain, dimana teknologi informasi yang berbasis elektronik ini menjadi gerbang utama untuk mendapatkan kebutuhan lainnya, sehingga barang apapun semakin mudah diperoleh dan diakses untuk mendapatkan informasi dengan sangat mudah. (Suparni, 2009:1)

Pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi saat ini menjadi dampak kompleknya kebutuhan manusia akan informasi itu sendiri. Internet telah menghadirkan kenyataan dalam kehidupan baru bagi setiap umat manusia, internet juga sudah mengubah terhadap jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Medium internet yang dapat melakukan suatu transaksi bisnis, belajar, belanja, berbincang dengan para kolega di seluruh penjuru dunia, dan bahkan dapat melakukan aktifitas lainnya dalam berbagai kehidupan nyata. Hubungan antara informasi dan teknologi jaringan komunikasi telah menghasilkan dunia maya yang sangat luas. Teknologi tersebut berisikan kumpulan informasi yang diakses oleh semua orang dalam bentuk jaringan-jaringan komputer tersebut yang disebut dengan jaringan internet sebagai media layanan atau penyedia informasi. (Arifandi, 2016:1)

Kejahatan yang sering terjadi dalam media internet adalah penipuan dengan mengatasnamakan bisnis online dengan menggunakan nama media internet menawarkan berbagai macam produk penjualan yang dijual dengan harga dibawah rata-rata. Bisnis online adalah bisnis yang dilakukan via internet sebagai media pemasaran dengan menggunakan website sebagai katalog. Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis online, sering kali menjadi pemicu tindak pidana penipuan ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan ini. Kasus seperti ini maka akan ditegakan dengan menggunakan hukum pasal 378, pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008. (Wahid dkk, 2005: 25)

Lahirnya Undang-Undang ITE yang pada tanggal 21 April 2008, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah mengatur sedemikian rupa terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam teknologi yang meggunakan media internet, Undang-Undang ITE bukanlah tindak pidana khusus, Undang-Undang ini tidak semata-mata memuat terkait hukum pidana saja, melainkan memuat tentang mengenai pengaturan pengelolaan informasi dan transaksi elektronik yang terjadi di tingkat nasional. UU ITE telah mengatur sedemikian rupa

terhadap pengaruh buruk dari pemanfaatan pada teknologi ITE. (Chazawi, 2011: 1)

Sejumlah laporan yang diterima oleh Kapolres Sleman akhir-akhir ini maraknya terjadinya peningkatan terhadap perbuatan melalui media elektronik (internet), kejahatan penipuan online tersebut dari tahun ke-tahun telah berlangsung tinggi. Peningkatan dalam hal ini telah berlangsung setidaknya 5 sampai 7 laporan yang masuk dalam seminggu di Polresta Sleman. Meningkat dan berkembangnya perbuatan penipuan online di dalam masyarakat seiring dengan kemajuan zaman. Ada banyak sekali laporan dari masyarakat yang merasa telah dirugikan oleh pelaku tindak pidana penipuan online melalui media elektronik, seperti yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di kabupaten Sleman membuat kepala Kepolisian Kapolres Sleman angkat bicara dengan memberikan himbauan kepada masyarakat akibat maraknya perbuatan penipuan online yang terjadi di lingkup kota sleman tersebut. Berkaitan dengan hal ini kepala Kapolres Sleman mengatakan bahkan dalam seminggu tindak pidana penipuan online bisa mencapai 7 kasus yang dilaporkan. Kepala kepolisian Kapolres Sleman mempunyai kewajiban dalam menanggulangi untuk menuntaskan masalah-masalah yang terjadi dikalangan masyarakat, sehingga pada kasus-kasus yang terjadi menggunakan media elektronik khususnya pada penipuan online dapat diminimalisir.

Pada hakikatnya pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah megubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban

manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sasaran efektif perbuatan melawan hukum. (Maskun,2014:29)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan mencari dan menganalisa apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya penipuan online yang dialami oleh Polres Sleman, dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penipuan *online* di Kabupaten Sleman ?
2. Bagaimana upaya penegakan dan pencegahan tindak pidana penipuan *online* di wilayah Polres Sleman secara integratif ?



## **C. Pembahasan**

### **a. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tindak Pidana Penipuan Online di Kabupaten Sleman.**

Perbuatan yang melawan hukum terkait tindak pidana penipuan online di media elektronik (*internet*) tidak akan terjadi tanpa adanya faktor-faktor utama yang akan mengakibatkan rawan nya terjadi penipuan online di media internet tersebut. Faktor-faktor utama terhadap penyebab terjadinya penipuan online tersebut adalah faktor masyarakat nya sendiri, masyarakat yang mudah tergiur dengan tawaran harga yang sangat murah. Sehingga dengan mudah di manfaatkan oleh para pelaku penipuan online tersebut, pelaku semakin meraja lela dengan trik-trik yang mereka pakai. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan laporan terkait kasus- kasus yang terjadi di Kabupaten Sleman dalam sepekan ini yaitu Tindak pidana penipuan online. Tidak itu saja. Faktor ekonomi juga merupakan faktor utama dari penyebab adanya tindak pidana penipuan tersebut, adanya himpitan gaya hidup yang berlebihan sehingga menjadikan seseorang untuk melakukan apa saja demi sesuatu yang mereka inginkan berdasarkan kebutuhan hidup mereka.

Berdasarkan laporan dari kepala Kapaolres Sleman Riski Ferdimansyah S.H., S.I.K di Tribun Jogja pada tanggal 27 Desember 2018 kiranya ada sekitar 6 sampai 7 kasus yang di laporkan dalam seminggu, yang artinya dalam situasi maraknya terjadinya tindak pidana penipuan

online melalui media internet ini sangat mengganggu tingkat kenyamanan dan keamanan pada masyarakat itu sendiri. Teknologi informasi saat ini menjadi suatu pedang bermata dua terhadap timbulnya suatu kejahatan yang melawan hukum.

Media sosial sebagai target bagi pelaku tindak pidana penipuan online, dengan perbuatannya bukan tanpa alasan. Berkaitan dengan hal tersebut untuk memperdalam data penulis sendiri telah melakukan wawancara terhadap berbagai narasumber yang berkompeten untuk membahas terkait faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan online dan bagaimana upaya penegakan serta pencegahan terhadap tindak pidana penipuan online di wilayah hukum Sleman tersebut.

Menurut Bapak Nuriandi sebagai Penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Sleman merupakan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya seseorang melakukan tindak pidana penipuan online (internet) yaitu:

1. Faktor masyarakatnya Sendiri

Masyarakat yang sangat tergiur dengan harga yang sangat murah yang sangat mudah percaya dan terbuai sehingga dengan cepat di manfaatkan oleh pelaku tindak pidana. Adanya trik-trik yang dilakukannya dapat mempermudah untuk kelancaran bisnis pelaku, maka dari itu faktor utama penyebab tindak pidana penipuan online

adalah adanya ketidak pengetahuan masyarakat, dan masyarakatnya pun seringkali melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan dirinya, namun tidak dibayangkan oleh masyarakatnya sendiri bahwa hal tersebut adalah bagian dari trik nya pelaku untuk kelancaran dan mempermudah jalan usahanya dalam melakukan penipuan. Penegakan hukum sebenarnya berasal dari masyarakat dan memiliki tujuan untuk mewujudkan kedamaian yang ada pada masyarakat itu sendiri.

Seringkali terjadi bahwa masyarakat selalu menilai kualitas barang lebih dulu tanpa memperhatikan dampak dari reaksi mereka, kadang ada barang yang di beli hasil nya tidak memuaskan mereka atau dengan kata lain barang yang di beli tidak sesuai dengan apa yang mereka lihat di foto, belum lagi harga yang di tawarkan pelaku kadang cukup mahal. Walau demikian masyarakat tetap harus membelinya lantaran barang yang di tawarkan adalah barang yang belum mereka lihat sebelumnya dan sudah tentu daya penarik bagi mereka untuk memilikinya, namun dengan hadirnya keinginan tersebut malah sebaliknya barang yang di beli ternyata tidak sama dengan apa yang mereka harapkan. Kadang juga ada barang yang ditawarkan terjangkau murah namun setelah transaksi di lakukan pelaku tindak pidana tidak memiliki kabar lagi, kejadian seperti ini kerap terjadi di kota setempat khusus nya pada wilayah hukum sleman.

Masyarakat yang hidup dengan berbagai macam ragam dan budaya selalu menginginkan sesuatu yang lebih dalam hidupnya, seperti memiliki barang-barang mewah, perhiasan-perhiasan mahal, dan lain-lain sebagai bahan pembeda dengan yang lain. Adanya kehidupan masyarakat yang demikian menambah gairah bagi pelaku tindak pidana untuk melakukan aksi mereka, sebab telah paham bagaimana keadaan masyarakat pada umumnya apalagi jika sudah berbicara terkait jual-beli online. Bagi pelaku tindak pidana media online merupakan sumber dana secara cepat untuk di manfaatkan, maka tidak heran mengapa kejahatan sering kali terjadi akibat penyalgunaan internet.

## 2. Faktor kultur budaya

Faktor budaya dapat mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan penipuan online. Pada hakikatnya seringkali terjadi pergeseran budaya dari budaya lama sampai ke budaya modern oleh masyarakat. Pada penyalagunaan ilmu pengetahuan itu sendiri baik bagi pelaku atau korban penipuan, dalam hal ini masyarakat dengan mudahnya menyalahgunakan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Budaya masyarakat juga selalu memiliki rasa ingin tahu yang berlebihan sehingga membuat para pelaku tindak pidana penipuan online dapat memanfaatkan situasi dan kondisi seperti ini. Pergeseran budaya tersebut dapat berdampak pada penyalagunaan ilmu pengetahuan dari bentuk pertanggungjawaban.

Keadaan budaya masyarakat yang demikian sangat menambah populasi kejahatan yang terjadi di media sosial, hal tersebut telah terbukti pada budaya moderen yang mereka lakukan dari rasa ke ingin tauhan mereka, rasa ingin memiliki, dan terjangkau praktis. Padahal sebelum adanya penjualan melalui internet ini masyarakat lebih memilih membeli secara langsung pada mall, toko-toko, dan atau pada pasar-pasar tradisional, namun akibat pergeseran budaya tersebut ternyata membawa petaka bagi masyarakat sendiri, karena merasa lebih cepat, praktis dan terjangkau lebih murah, namun tidak berpikir panjang bagaimana bentuk pertanggungjawaban apabila terjadi sesuatu yang tidak di inginkan, seperti saat ini maraknya penipuan menggunakan media internet.

Tidak hanya itu penyalagunaan pada ilmu pengetahuan terhadap masyarakat menjadi tolak ukur dari setiap kejadian-kejadian terjadi, karena pergeseran budaya ini membuat mereka tidak berpikir panjang akibat terbuai dengan kecanggihan teknologi yang ada, sehingga menimbulkan pemahaman yang berlebihan dan rasa ingin tahu dari kegunaannya dan bahkan sampai tidak terfikirkan bagaimana akhirnya. Mengetahui teknologi adalah suatu keharusan bagi masyarakat, namun tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat pun bisa menyalagunakan pengetahuan mereka.

### 3. Faktor Lingkungan.

Untuk faktor lingkungan ini memang menjadi hal yang paling umum dalam kehidupan sehari-hari, dan bahkan sebagai masyarakat pun hidup dengan ilmu sosial dan budaya yang semakin moderen apalagi mengenai penggunaan teknologi medial sosial (intertet). Faktor lingkungan ini juga sangat memberikan pengaruh besar pada masyarakat, dari masyarakat yang terbiasa berbelanja menggunakan internet menunjukkan daya tarik terhadap masyarakat lainnya untuk mengikuti karena lebih terlihat simpel, cepat, dan bahkan kerap dianggap praktis oleh masyarakatnya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat begitu cepat terpengaruh oleh lingkungan-lingkungan sekitar. Merasa ingin melakukan juga dan ingin tahu sehingga memaksakan dirinya untuk melakukan hal yang sama juga, padahal dari perbuatan tersebut masyarakat telah tau bahwa maraknya terjadinya tindak pidana penipuan online. Akan tetapi masyarakatnya sendiri selalu menawarkan dirinya untuk dijadikan mangsa suatu kejahatan tindak pidana khususnya pada kejahatan penipuan melalui media sosial.

Tercatat pada laporan yang diterima Kapolres Sleman, kebanyakan dari korban tindak pidana penipuan ini tidak hanya pada kalangan masyarakat biasa melainkan pada mahasiswa-mahasiswi yang berada di wilayah hukum Polres Sleman tersebut, tingkap laporan yang tinggi

ada pada kecamatan Depok, berbagai laporan pengaduan baik dari harga yang paling kecil maupun di atas rata-rata dan bahkan bisa mencapai jutaan rupiah, barang-barang yang biasa dilaporkan adalah pada pembelian handphone, belanja baju, sepatu, dan lain-lain. adanya kenaikan laporan tersebut bukan menjadi suatu pelajaran bagi mereka namun bahkan tetap bersih keras berbelanja menggunakan internet.

Pihak Kanit unit III Pada Kapolres Sleman telah berusaha dan mengoptimalkan semampu dan sebisa mereka untuk memberikan himbauna kepada masyarakat sekitar, namun karena masyarakatnya yang gigih menginginkan hidup yang praktis tidak ingin capek sehingga menjadi korban-korban penipuan. Walau demikian apapun itu, tugas aparat negara sebagai penegak hukum sudah perintah undang-undang untuk mengayomi dan mengamankan masyarakat dari berbagai bentuk ancaman yang dapat merugikan masyarakat. berbagai upaya-upaya yang dilakukan dan bahkan Kepala Kapolrespun angkat bicara dalam memberikan himbauan kepada masyarakatnya.

Lingkungan adalah suatu kesatuan baik berupa benda, keadaan ataupun makhluk hidup berada. Lingkungan merupakan tempat di mana masyarakat dan masyarakat lainnya saling berinteraksi satu sama lain, saling bertukar informasi, saling membutuhkan satu sama lain, dan saling mengayomi sebagai makhluk sosial dan budaya, yang

berhubungan dengan segala hal yang ada pada sekitar manusia termasuk pada hubungan timbal balik. Hal ini menunjukkan bahwa karena keadaan lingkunganlah yang dapat membawa faktor terjadinya penipuan tersebut, karena adanya dukungan dari orang yang terlebih dahulu sehingga tidak memikirkan dampak pada penggunaan internet dalam proses jual-beli barang atau kegiatan yang lainnya yang dapat menimbulkan dan atau menambah populasi kejahatan yang ada. Bapak Suhendra (Kanit unit III) menambahkan bahwa pada sebagian masyarakat yang tidak begitu paham masalah menggunakan internet apalagi sampai bisa berbelanja menggunakan teknologi canggih ini, dengan begitu seseorang tersebut akan tahu dan belajar cara menggunakannya dan bahkan mengerti apabila dalam lingkungan tersebut dalam kesehariannya hanya menggunakan media sosial.

**b. Upaya Penegakan dan Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Online di Wilayah Polres Sleman secara Integratif.**

Upaya penegak hukum yang dilakukan oleh Polres Sleman dalam tindak pidana penipuan online adalah dengan mengambil teori integratif. teori integratif merupakan teori yang memiliki peranan penting dan menentukan dalam mendefinisikan dan mempertahankan pada nilai-nilai idealisme yang dimana dapat memelihara kesinambungan pada pandangan hidup bersama, hal tersebut diwujudkan oleh Polres Sleman sebelum



dilakukan tindak lebih lanjut, Polres Sleman menawarkan dengan menggunakan jalan musyawarah untuk kedua belah pihak.

Tindakan yang dilakukan Polres Sleman telah memberi contoh dimana hukum sebagai sistem norma dalam nilai-nilai yang ada pada masyarakat, yang di wujudkan pada perilaku masyarakatnya dengan begitu masyarakat juga tidak kehilangan rohnya sebagai negara yang berpancasila. Perkembangan yang dilakukan penegak hukum (Polres Sleman) adalah suatu proses pengembangan hukum dalam mempertahankan nilai-nilai dan idealisme masyarakat untuk dipelihara agar berkesenambungan terhadap pandangan hidup bersama, yaitu pada pancasila.

Sebenarnya hukum adalah sarana atau tempat di mana di temukannya keadilan dalam hal berkonflik, hukum sebagai jalan penengah untuk mencapai masyarakat yang baik, aman, dan sejahtera. Hukum merupakan solusi konflik pada keadilan yang sesungguhnya dan bukan merupakan solusi satun-satunya dalam melakukan suatu penyelesaian, solusi konflik dan keadilan yang sesungguhnya ada pada hati nurani para pihak yang dimana disebut sebagai pelaku dan atau korban tindak pidana. Sangketa yang melalui pengadilan adalah sarana atau jalan terkahir dalam menyelesaikan suatu permasalahan guna memperoleh suatu keadilan, sedangkan pada masyarakat itu sendiri berdasarkan kesepakatan para pihak yang mendasar pada suatu jalan yang disetujuinya.

Pentingnya bagi penegak hukum dalam memahami karakter bangsa sendiri, bangsa yang memiliki berbagai budaya dan etnis dan bahkan luasnya sumber daya alam di dalamnya yang tak ternilai, dimana hal tersebut adalah suatu keharusan untuk dijaga dan dilindungi serta memeliharaanya agar lebih efektif dengan sungguh-sungguh yang berpijak terhadap jati diri bangsa, negara yang berdaulat dan merdeka. Tidak berpatokan pada negara-negara barat, sehingga negara Indonesia tidak kehilangan esensinya sebagai negara yang multi budaya, multi etnis, kondisi geografis yang luas, serta sumber daya alam yang tak ternilai, sehingga Indonesia dapat memiliki potensi dalam mengadaptasi dan mengadopsi suatu kemajuan yang lebih baik kedepannya.

Upaya penegakan tindak pidana penipuan online dalam pencegahan adalah :

1. Melakukan upaya secara Preventif dan Represif

- a. Upaya Preventif (pencegahan).

- 1) Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat.

Upaya ini dilakukan oleh Polres Sleman dalam hal melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan himbauan kepada masyarakat yang ada di wilayah hukum sleman tersebut, agar masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan berbagai bentuk transaksi jual-beli online yang dapat dengan mudah merugikan mereka sendiri akibat terlalu

percaya dan cepat terbuai dengan harga-harga yang diberikan oleh pelaku tindak pidana, lebih berhati-hati dan tidak mudah terpengaruh begitu saja. Tugas ini dilakukan oleh Bapak Riski Ferdiansyah S.H., S.I.K. selaku kepala Kapolres Sleman beserta jajarannya Kanit Unit III untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat itu sendiri.

- 2) Melakukan pemasangan Spanduk “Hati-hati terhadap Penipuan online” dipasangkan di berbagai tempat yang ada di wilayah hukum Sleman, baik di berbagai instansi, Bank, wilayah kampus, dan lain-lain.

Upaya ini dilakukan oleh Polres Sleman dengan cara melakukan pemasangan Spanduk “Hati-hati terhadap penipuan online yang ada di wilayah hukum Sleman tersebut, agar dengan mudah dan merupakan cara cepat untuk memberikan himbauan kepada masyarakat terkait maraknya terjadi penipuan selain memberikan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, dilakukan antaranya baik instansi, bank dan di berbagai wilayah kampus-kampus yang ada di kabupaten Sleman tersebut.

b. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan oleh Polres Sleman untuk menangani terkait kasus tindak pidana penipuan yang berbasis online dengan cara melakukan sidik dan lidik. Pada proses lidik itu sendiri seperti

menerima laporan pengaduan dari masyarakat kemudian dapat dilakukan penanganan lebih lanjut oleh pihak Kanit Unit III. Sedangkan proses sidik merupakan proses telah di terimanya laporan dari pengaduan dan dapat dikoordinasikan guna memeriksa terhadap laporan korban apakah dapat di lakukan pemeriksaan lebih lanjut atau tidak. Jika dapat dilakukan maka pihak penyidik dapat terjun langsung ke lapangan guna dilakukan tindakan penyelidikan yang sesuai aturan atau prosedur penyidik kepolisian pada wilayah hukum Polres Sleman.

2. Melakukan pembukaan rekening pelaku tindak pidana kepada pihak perbankan atas permintaan penyidik.

Pihak kepolisian dalam hal ini telah melakukan berbagai cara seperti, mengambil solusi untuk memblokir rekening pelaku tindak pidana penipuan online yang telah dikoordinasi terlebih dahulu dengan pihak bank, dalam hal ini untuk kelancaran pada saat proses pembuktian yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam menyelidiki kasus tindak kejahatan penipuan tersebut dan dalam pengupayaan ini pihak penyidik Polres Sleman hanya bisa melakukan sampai pemblokiran saja kepada pihak Bank dalam menanggulangi kejahatan, yang berdasarkan ijin tertulis.

3. Mengoptimalkan daya kerja antara pihak pinyidik Polres Sleman dengan pihak Institusi yang Berkaitan.

a. Lembaga Bank karena Alasan Birokrasi.

Pengupayaan yang dilakukan oleh penyidik Polres Sleman adalah dapat mengoptimalkan antara pihak penyidik dengan pihak perbankan, dalam membantu proses pembuktian yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sehingga dalam hal ini penyidik dapat dengan mudah mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan yang sesuai kebutuhan yang ada pada pelaku walau ijin sampai pemblokiran saja, karena Bank pun harus tetap menjaga kerahasiaan bank yang berdasarkan aturan pada pasal 1 ayat (28) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Ijin pemblokiran ini dilakukan secara tertulis dari pihak penyidik kepada pihak Bank. Perbuatan ini dilakukan demi mendapatkan bukti yang konkrit dari pelaku.

b. Daya Kerja dengan Institusi Kominfo

Pengupayaan ini juga dilakukan oleh Polres Sleman dalam rangka untuk mengoptimalkan pada proses penyidikan yang berkaitan dengan Transaksi Elektronik, yang dimana pada kesempatan ini untuk memperlancar pada saat proses pembuktian. Upaya ini dilakukan agar kasus-kasus terkait tindak pidana penipuan berbasis online, sehingga pihak penyidik dapat dengan mudah melakukan penyelidikan lanjutan terkait kasus tersebut.

c. Daya Kerja dengan Ahli Pidana, dan

Terhadap upaya ini Polres Sleman melakukan pengupayaan yang berkaitan dengan tindak pidana setelah dilakukan wawancara terhadap penyidik apakah kasus tersebut bisa atau tidaknya dilakukan tindakan lanjutan, hal ini dilakukan oleh Polres Sleman guna membantu pada saat proses penyidikan. Maka dari itu untuk kelancaran tersebut pihak penyidik membutuhkan seorang ahli pidana dalam menangani kasus yang semacam tersebut, sudah tentu keterkaitannya dengan ahli pidana dan bisa dilaksanakan apabila seorang ahli pidana mendapatkan ijin tertulis (surat) yang diberikan oleh pihak yang berwenang.

d. Daya Kerja dengan Ahli Bahasa

Upaya yang dilakukan oleh Polres Sleman dalam rangka hambatan pada saat proses pembuktian yang dilakukan oleh penyidik, dalam hal ini jika terjadi kasus tindak pidana penipuan online yang menggunakan bahasa-bahasa Asing atau bahasa lainnya selain bahasa Indonesia, disinilah pengupayaan yang dilakukan oleh Polres Sleman dengan melibatkan ahli bahasa dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada. Sehingga dapat dengan mudah menggambarkan sesuatu hal yang terjadi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

4. Melakukan himbauan kepada masyarakat terkait tindak pidana penipuan online.

Upaya yang dilakukan oleh Humas Polres Sleman adalah melakukan atau menyampaikan himbauan kepada masyarakat terkait maraknya penipuan jual-beli online yang dilakukan menggunakan media internet sebagai penyebarluasan informasi dan mengharapkan masyarakat agar bisa menyebarluaskan juga terkait informasi tersebut yang terjadi di lingkup masyarakat Sleman, himbauan tersebut dilakukan oleh bapak Riski Ferdiyansyah SH, S.I.K melalui Tribun Jogja, dengan harapan masyarakat agar lebih hati-hati lagi dalam melakukan jual-beli online ataupun melakukan transaksi lainnya, dengan tujuan agar masyarakatpun lebih waspada dan menghindari dari segala modus penipuan jual-beli online agar mengurangi meningkatnya tingkat kejahatan penipuan jual-beli online di kabupaten Sleman.

5. Melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana (kejahatan) Penipuan online

Menurut bapak Suhendra selaku anggota Banit Unit 3 Polres Sleman, tindak pidana penipuan yang terjadi di kabupaten Sleman saat ini masih dalam tahap penyelidikan, yang mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum Acara Pidana (KUHAP) dimana penyidikan merupakan suatu aktifitas yuridis yang

dilakukan penyidik untuk mencari dan mencari kebenaran yang konkrit agar terang, jelas, terhadap tindak pidana yang terjadi. Penipuan jual-beli *online* tersebut harus dibantu dengan adanya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada undang-undang ini dapat mengatur mengenai tindak pidana penipuan *online* akan tetapi dapat mengacu juga pada peraturan yang ada pada pasal 28 ayat (1) UU ITE yang dimana telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana. Penyidik Banit Unit 3 di bidang Sat Reskrim Polres Sleman dalam menanggulangi tindak pidana penipuan jual-beli online tersebut, masih menggunakan pasal 378 yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang di mana telah mengatur terkait tindak pidana penipuan secara konvensional yang dimana telah menentukan sebagai tindak pidana penipuan *online*, termasuk pada penipuan jual-beli *online*

Rangkaian penyidikan ini terdapat penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, penindakan terhadap pelaku tindak pidana (kejahatan). Dan melakukan penyidikan terhadap tersangka sampai membuat laporan dari hasil berkas perkara tindak pidana. Polres Sleman pada kasus penipuan jual-beli online telah melanggar ketentuan pada pasal 378 KUHP yang dimana telah ditetapkan sebagai kejahatan penipuan yang dimana dalam bentuk umumnya



tercantum dalam pasal 28 ayat (1) Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan hasil wawancara yang di kemukakan di atas dapat kita ketahui bahwa terjadinya tindak pidana penipuan online tersebut karena adanya beberapa faktor dan keadaan masyarakat nya sendiri (pribadi), adanya pergeseran budaya dan lingkungan serta besar peranan korban yang dapat mempermudah dan melancarkan kejahatan tindak pidana penipuan yang menggunakan kecanggihan teknologi (media sosial). Terhadap penggunaan media sosial yang cukup mengundang berbagai macam kejahatan perlu adanya pengaturan dan atau penegakan hukum yang efektif pada pelaku tindak pidana sehingga dengan demikian dapat meminimalisirkan, maka terciptalah masyarakat yang tentram dan damai dalam melakukan transaksi menggunakan media internet.

Di indonesia masih sangat menghawatirkan selama fasilitas-fasilitas pada sumber daya manusia maupun pada bidang teknologi masih melemahkan keadaan yang ada, karena untuk mendapatkan ijin jalan (perijinan) dalam keterbukaan sangat membutuhkan waktu yang cukup lama. Berbagai macam upaya yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam menjalankan tugas mereka. Kenaikan laporan pada

kasus penipuan ini sangat mengganggu tingkat kenyamanan masyarakat terutama pada pihak Polri dan penyidik dalam menjalankan tugas sebagai pihak keamanan dan kenyamanan warga negara Indonesia khususnya pada wilayah hukum Sleman, karena laporan aduan dari masyarakat semakin meningkat sedangkan pelaku kejahatan masih dalam proses penyidikan.

## **D. Kesimpulan**

### **1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Tindak Pidana Penipuan di Kabupaten Sleman**

Terjadinya tindak pidana penipuan di media *online* (internet) di pengaruhi berbagai faktor, antara lain pada faktor masyarakat , faktor kultur budaya dan faktor lingkungan. Mudahnya pelaku tindak pidana karena adanya peluang dari masyarakat itu sendiri yang dengan mudah tergiur dengan harga yang sangat murah, mudah percaya dan kurangnya ilmu pengetahuan, akibanya pelaku tindak pidana dapat dengan mudah memanfaatkan situasi dengan memiliki trik-trik seperti itu. Adanya kultur budaya yang dimana budaya lama telah di kedepankan dengan hadirnya budaya moderen oleh masyarakat, memiliki rasa ingin tahu yang berlebihan sehingga para pelaku tindak pidana dapat dengan mudah memanfaatkan perbuatan tersebut, demikian juga dalam penyalagunaan ilmu pengetahuan mereka. Pada faktor lingkungan dimana masyarakat juga mudah terpengaruh dengan tingkah laku seseorang yang sejak awal memiliki kebiasaan berbenanja menggunakan media sosial (internet), tentu dari itu sebagai manusia yang memiliki ilmu sosial dan merasa ingin tahu lalu memaksakan dirinya untuk melakukan hal yang sama, padahal masyarakatnya sendiripun tahu perbuatan tersebut sudah memakan banyak korban akan tetapi masyarakatnya sendiri selalu menawarkan diri sebagai mangsanya para pelaku tindak pidana. Hal ini menunjukan bahwa

dari masyarakat sendirilah yang menyebabkan faktor utama pada tindak pidana penipuan online tersebut.

## **2. Upaya Penegakan dan Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Online di Wilayah Polres Sleman secara Integratif**

Upaya yang dilakukan oleh Polres Sleman menggunakan upaya damai dalam rangka dilakukan musyawarah terlebih dahulu di antara kedua belah pihak, dalam hal ini masyarakat diberi pengetahuan dan berusaha untuk memahami nilai-nilai dan atau norma-norma yang berlaku pada masyarakat itu sendiri. Upaya penegakan dengan mengantisipasi keadaan dimana dilakukannya musyawarah tersebut untuk mewujudkan perilaku masyarakat, dengan begitu masyarakat juga tidak kehilangan rohnya sebagai negara yang bep Pancasila. Perkembangan yang dilakukan oleh penegak hukum ( Polres Sleman) adalah suatu proses pengembangan hukum dalam mempertahankan nilai-nilai dan idealisme masyarakat untuk dipelihara agar berkesinambungan terhadap pandangan hidup bersama, yaitu Pancasila, dengan begitu esensi dan peranan masyarakat didalamnya tetap terjaga.

Polres Sleman telah melakukan berbagai upaya dalam menangani dan berusaha memberikan daya kerja mereka sebagai aparat negara yang di tugaskan untuk menyelidiki dengan tuntas sampai pelaku dapat di ringkus. Mulai dari pihak Penyidik meminta bantuan kepada pihak perbankan untuk mendapatkan hasil pemblokiran nomor Rekening

pelaku tindak pidana, dan berbagai bukti lainnya yang dapat membantu pihak penyidik dalam berbagai bentuk penyelidikan. Tidak hanya itu, upaya lainnya di lakukan pencegahan oleh pihak penyidik Polres Sleman adalah dengan melakukan sosialisasi terkait himbauan kepada masyarakat, memasang stiker di daerah-daerah yang rawan terjadi tindak pidana, guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar tidak dengan mudah percaya dan lebih hati-hati dalam melakukan transaksi jual-beli online (internet), dan pengoptimalan antara penyidik dengan pihak institusi yang berkaitan, baik Bank, Kominfo, ahli pidana, serta ahli bahasa. Tindak pidana penipuan yang terjadi di kabupaten Sleman saat ini ada yang masih dalam tahap penyelidikan, dan ada sebagian pelaku dengan penipuan yang jumlahnya kecil dan sebagian juga laporan yang masuk masih dalam tahap penyelidikan. Mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum Acara Pidana (KUHAP) dimana penyidikan merupakan suatu aktifitas yuridis yang dilakukan penyidik untuk mencari dan mencari kebenaran yang konkrit agar terang, jelas, terhadap tindak pidana yang terjadi.

#### **E. Saran**

Maraknya kasus tindak pidana penipuan online wilayah hukum Polres Sleman, sangat diperlukan penegakan hukum yang tegas pada pihak kepolisian dalam menjalankan tugas yang diperintahkan, terutama dalam waktu penyidikan, pihak kepolisian untuk menangkap pelaku kejahatan tindak

pidana penipuan melalui media sosial (internet) sebagaimana yang di atur dalam aturan atau norma-norma hukum yang berlaku. Untuk para pembuat undang-undang agar segera melakukan perubahan/amandemen terkait KUHP pada pasal 378 karena dalam hukumnya masih di nilai tidak terlalu mendapatkan efek jera (ringan) untuk dirasakan bagi pelaku tindak pidana, maka dari itu pihak kepolisian dalam hal ini dapat menggunakan pada pasal 45A ayat (1) Bab XI tentang ketentuan pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2006 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008. Perlu adanya peningkatan berbagai sumber daya manusia, masih kurang nya fasilitas-fasilitas untuk keberlangsungan tugas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas, Masih minimnya petugas terhadap ilmu yang khusus dalam menangani kasus-kasus khusus tentang *cyber crime* seperti yang di alami saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi, (2011). *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*. Bayumedia Publishing.
- Abdul Wahid dan Muhamad Labib, (2005). *Cyber Crime, Kejahatan Mayantara*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ach Tahir, (2010). *cyber Crime* (Akar Masalah dan Solusi Penanggulangannya). Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press
- Andi Hamzah, (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Arifandi, (2016). *cyber crime dan antisipsinya secara yuridis*. Inspektorat Jendral Depkominfo
- Barda Nawawi Arif, (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bnadung: PT. Citra Aditya Bakti
- Barda Nawawi Arif, (2005). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan hukum Pidana*. Bndung: PT. Citra Aditya Bakti
- Barda Nawawi Arif, (2001). *Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Barda Nawawi Arif, (1998). *Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana*. Bandung: Cintra Aditya Bakti.
- Chajawi Adam, (2001), *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dellyana, Shant, (2008). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Efendi Erdianto, (2011). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Hj, Tien. S. Hulukati dan Gialdah Tapiansari. B. (2006). *Hukum Pidana Jilid 1*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

- Hiariej, (2014). *Pinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Harun M. Husein, (1991). *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Rineka Cipta
- Jenderal, D. (2004). *Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia*
- Lawrence M. Friedmant, (1975). *The Legal System A Social Scince Prespective*. New York: Russel Sage Foundation
- Moeljatno (1993). *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara
- Muladi, dan Dwidja Piyanto. (1991). *Pertanggungjawaban korporasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Sekolah Hukum
- Moeljatno (2008). *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Maskun (2014), *Kejahatan cyber*, Jakarta.
- Moeljatno (1996). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moeljatno (2015). *Aasas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nining Suparni, (2009). *Cyberspace problematika dan antisipasi pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Roeslan Saleh, (1987). *Sifat Melawan Hukum dan Perbuatan Pidana*. Jakarta: Aksara Baru
- Shant Dellyana (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Soerjono Soekanto, (2013). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengakan Hukum*. Jakarta: Ctk.Ke Dua Belas Rajawali Pers.
- Sunarto, (2016). *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.



- Soerjono Soekanto, (1982). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press.
- Shafrudin, (1998). *Politik Hukum Pidana Lampung*: B. Lampung
- Sudarto, (1990). *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto
- P. A. F. Lammintang, (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonsia*. Bandung: PT. Cintra Adtya Bakti
- P. A. F. Lammintang, (1996). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonsia*. Bandung: PT. Cintra Adtya Bakti
- Van Hammel dan Utrecht, (2003). *Rangkaian Sari Hukum Pidana 1*. Bandung: Reflika Aditama.
- Wirjono Prodjodikoro, (2003). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Reflika Aditama
- Yulis Tiana Masriani, (2004). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

### **Peraturan Perundang-undangan**

- UU No.11 Tahun 2008 Tentang *Informasi dan Transaksi Eelektronik* (ITE).
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- UU No. 19 Tahun 2016 atas perubahan UU No. 11 Tahun 2011 Tentang *Informasi Transaksi Elektonik* (ITE)

### **Karia Ilmiah**

- Dina Achristi, (2018), *Tindak Pidana Penipuan Via Online di Polresta Yogyakarta*.
- Deni Wahyuning Ismoyo, (2014). *Kendala Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Elektronik*.
- Rizki Amalia, Heni Siswanto, Damanhuri WN. *Analisis Yuridis Pengakan HukumPidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online*.

## **Jurnal**

Fitriani dan Kunarto (2017). *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi Polres Lampung Utara)* Jurnal Hukum digilib.unila.ac.id

Galang Meilaza Shidoi, (2016). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online di Polres Sleman*.

Romli Atmasasmita, (2017). *Memahami Teori Integratif*. Legalitas Unbari.ac.id

Sarifah Megawati, (2017). *Pengakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008. Tentang Informasi Teknologi Elektronik Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*. Jom Fakultas Hukum Volume IV.

Tanwir dan Atmasasmita (2015). *Teori Hukum Integratif*. Repository. Unpas.ac.id

## **Website**

Blogspot.com, *Waspadai Jenis Penipuan Online di Sosial Media*. Rabu 11 Januari 2012, [http://all-hikayatu.blogspot.com/2012/01 Waspadai-Jenis-Penipuan-Online-di, html](http://all-hikayatu.blogspot.com/2012/01/Waspadai-Jenis-Penipuan-Online-di.html). Diakses pada tanggal 08 Oktober 2019 pukul 23:12 WIB